



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

Nomor : B/ 608 /III/2013/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Rencana Aksi/Kegiatan Kampanye  
Anti Penyalahgunaan Narkoba  
Dalam Rangka HANI 2013

Jakarta, 25 Maret 2013

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- c. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011 - 2015.

2. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2011, menunjukkan angka prevalensi (penyalahguna narkoba) nasional adalah 2,2% dari jumlah penduduk Indonesia (3,8 juta orang), dibawah angka proyeksi 2,32% (setara dengan 4 juta orang). Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan, dan mengindikasikan upaya-upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia telah memperoleh hasil yang signifikan. Pada tahun 2015 diprediksi angka prevalensi akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 juta orang) apabila seluruh komponen bangsa tidak melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan yang komprehensif.

/3. Permasalahan.....

3. Permasalahan narkoba berdampak negatif pada kehidupan sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional bangsa. Di bidang sosial, permasalahan narkoba berdampak pada timbulnya kejahatan ikutan (*related crimes*), pelanggaran hukum, dan turut mempercepat berkembangnya HIV/AIDS dan Hepatitis. Di bidang ekonomi permasalahan narkoba dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, hasil survei BNN pada tahun 2011 menunjukkan total kerugian biaya ekonomi dan sosial diperkirakan sekitar 48,2 triliun.
4. Secara global penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, oleh karena itu perlu wujud nyata dan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 untuk bersama-sama berupaya mewujudkan "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 26 Juni 2011.
5. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2013, dengan tema sentral HANI 2013 yaitu "Global Action For Healthy Communities Without Drugs" (Aksi Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat Tanpa Narkoba), yang merupakan wujud keprihatinan dunia terhadap para korban penyalahgunaan narkoba yang terus berjatuhan, serta wujud solidaritas bersama masyarakat dunia untuk terus-menerus mengupayakan pemulihan para korban penyalahgunaan narkoba, maka dihimbau kiranya Kementerian masing-masing berkenan untuk melaksanakan berbagai kegiatan kampanye anti penyalahgunaan narkoba guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan daya tangkal masyarakat untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
6. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan  
1. Kepala BNN  
2. Sekretaris Utama BNN  
3. Inspektur Utama BNN

**PARA SEKRETARIS KEMENTERIAN**

1. SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
2. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
3. SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
4. SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH AGUNG
5. SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
6. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
7. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN DAERAH
8. SEKRETARIS KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA
9. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
10. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
11. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT "
12. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
13. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI
14. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
15. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
16. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
17. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
18. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
19. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN
20. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
21. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
22. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
23. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
24. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
25. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
26. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
27. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
28. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL
29. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
30. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
31. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
32. SEKRETARIS KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
33. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
34. SEKRETARIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
35. SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

36. SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKASI
37. SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
38. SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/KEPALA BAPPENAS
39. SEKRETARIS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
40. SEKRETARIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
41. SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
42. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
43. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
44. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Maret 2013

a. n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan  
Selaku  
Ketua Umum HANI 2013



Yappi Manafe